

Judul : Tantangan calon komisioner: BPKN lemah hadapi perusahaan kakap
Tanggal : Jumat, 01 Desember 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Tantangan Calon Komisioner BPKN Lemah Hadapi Perusahaan Kakap



Darmadi Durianto

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto mendorong para kandidat Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tegas terhadap pelaku usaha kakap yang seringkali merugikan konsumen. Hal itu penting, mengingat selama ini BPKN tidak berdaya memperjuangkan hak konsumen ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan 'Big Giant'.

"Bapak nanti berhadapan dengan banyak Big Giant, para pelaku usaha besar. Waktu (kasus) Meikarta, berhadapan dengan Lippo Group, BPKN tidak berdaya" kata Darmadi dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Komisioner BPKN Periode 2023-2026 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Darmadi bilang, sesuai undang-undang, BPKN wajib memberikan perlindungan kepada konsumen. BPKN memiliki visi menjadi lembaga terdepan bagi terwujudnya konsumen yang bermartabat dan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Tapi yang terjadi, sambung dia, BPKN tak kuasa berhadapan dengan pelaku usaha Mei-

karta. Para konsumen akhirnya memperoleh apa yang menjadi hak-haknya, setelah mereka ramai-ramai mengadukan nasibnya ke DPR.

Darmadi mengatakan, kasus Meikarta hanya salah satu perusahaan Big Giant yang bakal dihadapi para Komisioner BPKN dalam melaksanakan tugasnya. Ini belum termasuk perusahaan produsen susu bayi, pelaku usaha emas, yang pemainnya rata-rata merupakan oligarki dan penguasa-penguasa ekonomi negara.

"Apa strategi Anda, dan beranikah Anda saat itu bertindak? Kemudian apa strategi untuk menghadapi Big Giant itu?" tanya Darmadi.

Darmadi mengatakan, selama ini *bargaining position* konsumen jauh lebih rendah dibanding pelaku usaha. Yang terjadi, konsumen selalu menjadi pihak yang dirugikan atau korban.

Ketidakberdayaann BPKN ini pula yang membuat DPR banyak menerima laporan dari masyarakat atas perilaku curang pelaku usaha.

"Karena apa yang terjadi di BPKN sekarang adalah *Lame Duck*, nggak bisa berbuat apa-apa karena hanya menerima laporan, dana terbatas dan pasalnya (dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen) melumpuhkan semua," terangnya.

Situasi itu pula yang membuat aspek perlindungan hukum bagi konsumen menjadi lemah. Dalam istilah hukum, antara *Das Sollen* dan *Das Sein* terjadi *gap* yang cukup lebar.

Das Sollen disebut kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Sedangkan *Das Sein* dianggap sebagai keadaan yang nyata. ■ KAL